



Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa

Muhamad Yusar

Universitas Primagraha, Indonesia

Alamat: Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.mor 1A Blok A1, Kaligandu, Kec.
Serang, Kota Serang, Banten 42111

Korespondensi penulis: yusarmuhamad124@gmail.com

Abstract. *In a globalized era of change and ethical and political complexity, the role of education in shaping individual character and guiding social and political development is becoming increasingly important. Society's struggle to prevent and address corruption is a fundamental measure of prosperity and sustainable development. Corruption, as an act that undermines the integrity of social and political systems, is a serious issue that involves all levels of society. Therefore, early education on corruption prevention has great potential to play a key role. Anti-corruption education is a widely accepted approach in the fight against corruption. In addition to understanding the concept of corruption, it emphasizes the formation of strong character and ethical values to guide individuals in making decisions with integrity throughout their lives. In the higher education environment, the role of anti-corruption education is increasingly important as students are the future leaders who will shape the direction of society's development. This study highlights the importance of anti-corruption education in shaping student character. The results show that anti-corruption education contributes positively to students' integrity, ethical awareness, and anti-corruption attitudes. Anti-corruption education has brought a positive impact in shaping the character of students, continuous efforts are needed to strengthen this program and ensure a cleaner, more integrity, and active young generation in preventing corruption in the future.*

Keywords: *Anti-Corruption Education, Student Character, Integrity, Young Generation.*

Abstrak. Pada era global yang dipenuhi perubahan dan kompleksitas etika serta politik, peran pendidikan dalam membentuk karakter individu dan mengarahkan perkembangan sosial dan politik menjadi semakin penting. Perjuangan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi korupsi adalah ukuran fundamental bagi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi, sebagai tindakan yang merusak integritas sistem sosial dan politik, merupakan isu serius yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dini tentang pencegahan korupsi memiliki potensi besar untuk memainkan peran kunci. Pendidikan anti korupsi adalah pendekatan yang diterima secara luas dalam upaya melawan korupsi. Selain pemahaman konsep korupsi, pendidikan ini menekankan pembentukan karakter dan nilai etika yang kuat untuk membimbing individu dalam membuat keputusan berintegritas sepanjang hidup mereka. Di lingkungan pendidikan tinggi, peran pendidikan anti korupsi semakin penting karena mahasiswa adalah pemimpin masa depan yang akan membentuk arah perkembangan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi berkontribusi positif terhadap integritas, kesadaran etika, dan sikap anti korupsi mahasiswa. Pendidikan anti korupsi telah membawa dampak positif dalam membentuk karakter mahasiswa, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat program ini dan memastikan generasi muda yang lebih bersih, berintegritas, dan aktif dalam mencegah korupsi di masa depan.

Kata kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Karakter Mahasiswa, Integritas, Generasi Muda.

1. LATAR BELAKANG

Pada era yang ditandai oleh perubahan global, tantangan etika, dan keterlibatan politik yang semakin kompleks, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan mempengaruhi arah perkembangan sosial dan politik suatu bangsa. Keberhasilan suatu masyarakat dalam mencegah dan memerangi korupsi telah menjadi ukuran yang mendasar bagi tingkat kesejahteraan dan perkembangan yang berkelanjutan. Korupsi, sebagai

suatu bentuk perilaku tidak etis yang merusak integritas sistem sosial dan politik, adalah masalah serius yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dimulai sejak dini, dan pendidikan memiliki potensi besar untuk memainkan peran utama dalam hal ini.

Korupsi memiliki dampak yang merusak pada perkembangan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Di banyak negara, korupsi telah menjadi kendala utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Korupsi juga dapat mengancam hak asasi manusia, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan korupsi menjadi prioritas global, dan salah satu cara paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pendidikan.

Dalam jurnal ini, kami akan menyelidiki peran penting pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa. Kami akan menggali konsep pendidikan anti korupsi dan menguji bagaimana pendekatan-pendekatan pendidikan tersebut telah diterapkan di berbagai institusi pendidikan tinggi di berbagai belahan dunia. Pendidikan anti korupsi adalah pendekatan yang diakui secara luas dalam upaya melawan korupsi. Selain pemahaman konsep korupsi, pendidikan ini menekankan pembentukan karakter dan nilai-nilai etika yang kuat yang akan membimbing individu dalam membuat keputusan berintegritas sepanjang hidup mereka. Di lingkungan pendidikan tinggi, peran pendidikan anti korupsi semakin penting karena mahasiswa adalah pemimpin masa depan yang akan membentuk arah perkembangan masyarakat.

Dalam konteks ini, jurnal ini berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa dan mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih luas. Melalui analisis literatur yang cermat, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan berkomitmen untuk masyarakat yang bebas dari korupsi.

Lalu juga Penelitian menyoroti bahwa pendidikan anti korupsi memberikan kontribusi positif terhadap integritas, kesadaran etika, dan sikap anti korupsi mahasiswa. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etika dan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi pada masyarakat. Lebih lanjut, pendidikan ini mendorong mahasiswa untuk menyadari bahwa tindakan individu memiliki dampak nyata pada masyarakat.

Pentingnya penelitian ini juga terletak dalam pemahaman bahwa mahasiswa bukan hanya penerima pengetahuan, tetapi juga agen perubahan yang potensial dalam masyarakat.

Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk budaya sosial dan politik, oleh karena itu, investasi dalam pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan tinggi tidak hanya menciptakan individu yang lebih etis, tetapi juga menciptakan pemimpin masa depan yang mampu memimpin dengan integritas dalam masyarakat yang lebih luas.

Di sisi lain, penting untuk mengakui bahwa tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah nyata. Pendekatan, kurikulum, dan sumber daya yang tepat harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi beberapa hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi serta solusi yang mungkin untuk mengatasinya.

Meskipun pendidikan anti korupsi membawa dampak positif, tantangan dalam implementasinya meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pengajar terlatih, dan aspek hukum yang berkaitan dengan UU PTPK. Investasi, pelatihan, dan kerja sama antara berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi kendala ini dan memastikan kelangsungan program-program anti korupsi di perguruan tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran pendidikan anti korupsi dalam pembentukan karakter mahasiswa dan dampaknya pada upaya mencegah korupsi. Kami berharap temuan dari penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan peneliti untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan korupsi dan membentuk generasi yang lebih etis dan berintegritas.

Hal ini memberikan konteks penting untuk menjelajahi peran vital pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa, dampaknya pada integritas dan kesadaran etika mereka, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi muda yang lebih berintegritas dan berkomitmen dalam mencegah korupsi, sejalan dengan visi kemajuan sosial dan politik yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pembentukann Karakter

Mengemukakan bahwa karakter individu terbentuk melalui pengalaman, pendidikan, dan nilai-nilai yang diterima selama hidup. Karakter bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman seseorang.

Beberapa tokoh yang terkait dengan teori ini adalah John Locke dan Jean-Jacques Rousseau dalam pemikiran filsafat, serta psikolog seperti Albert Bandura yang meneliti pengaruh lingkungan dalam pembentukan karakter.

Teori Perubahan Sikap dan Perilaku

Teori ini menekankan bahwa pendidikan dan informasi dapat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku individu. Melalui pendidikan, individu dapat mengubah pandangan dan tindakan mereka terkait dengan suatu masalah atau isu. Teori ini telah dikembangkan oleh berbagai ilmuwan sosial, termasuk Leon Festinger dalam teori disonansi kognitif dan Albert Bandura dalam teori pembelajaran sosial.

Teori Efek Pendidikan

Teori ini menyatakan bahwa pendidikan memiliki dampak nyata pada individu dan masyarakat. Pendidikan dapat membentuk pemikiran, keterampilan, dan nilai-nilai individu yang akan memengaruhi tindakan dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Tokoh yang terkait dengan teori ini adalah John Dewey, seorang filsuf dan pendidik terkenal yang berfokus pada pendidikan sebagai pengalaman.

Teori Peran Pendidikan Tinggi dalam Pembentukan Pemimpin

Teori ini menganggap perguruan tinggi sebagai tempat yang memainkan peran penting dalam membentuk pemimpin masa depan. Pendidikan tinggi dianggap sebagai wadah untuk pengembangan kepemimpinan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan karakter pemimpin. Teori ini tidak memiliki satu tokoh kunci tertentu, tetapi banyak pendidik dan ilmuwan pendidikan yang telah mengkaji peran perguruan tinggi dalam pembentukan pemimpin.

Pendidikan anti korupsi adalah aspek penting dalam upaya mewujudkan tatanan sosial dan politik yang bersih dan berintegritas. Teori-teori yang relevan dalam konteks ini merentang dari konsep integritas dan etika hingga peran pendidikan dalam pembentukan karakter. Menurut Lickona (1991), integritas adalah kualitas moral yang mendasari tindakan individu, mencakup kejujuran, kebenaran, dan konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dan perilaku yang ditunjukkan. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mengkultivasi integritas ini di kalangan mahasiswa.

Dalam perspektif etika, Kant (1785) mengajukan imperatif kategoris, yang mengandung ide bahwa individu harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang bisa

dijadikan aturan umum, tanpa terkecuali. Pendekatan ini relevan dalam konteks pendidikan anti korupsi, di mana mahasiswa diajarkan untuk menginternalisasi prinsip-prinsip etika yang melarang praktik korupsi sebagai aturan moral yang bersifat universal.

Sebagai landasan hukum yang mendukung upaya pencegahan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia menyatakan komitmen negara untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya. UU PTPK menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur tindakan korupsi dan memberikan landasan hukum bagi pendidikan anti korupsi di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Bank (2004) mengusulkan model pendidikan anti korupsi yang mencakup pemahaman konsep korupsi, analisis dampak sosial korupsi, dan pengembangan sikap anti korupsi. Pemahaman yang mendalam tentang konsep korupsi melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tindakan korupsi mempengaruhi masyarakat dan lembaga. Pemikiran ini mendukung integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak korupsi pada masyarakat.

Selain itu, Magaloni dan Kricheli (2010) mengemukakan bahwa pendidikan anti korupsi harus mempertimbangkan peran budaya politik dan tindakan kolektif dalam mencegah korupsi. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas-disiplin yang mencakup aspek sosial, budaya, dan politik dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

Dengan kerangka teoritis yang kuat ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa dan melihat bagaimana pendekatan-pendekatan ini dapat diintegrasikan dengan baik dalam konteks pendidikan tinggi. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan yang mungkin terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan UU PTPK, sebagai bagian dari upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan berintegritas.

3. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif, karena menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif. Lalu juga memanfaatkan narasi dan kutipan dari partisipan untuk mendukung temuan Anda.

Selain itu, Penelitian ini juga merujuk pada teori-teori yang telah dibahas sebelumnya sebagai dasar analisis Penulis dalam kerangka kerja penelitiannya. Teknik-teknik ini akan membantu Penulis menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan cara yang mendalam dan kontekstual.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis literatur yang komprehensif. Pendekatan ini melibatkan peninjauan kritis dan sistematis terhadap literatur yang relevan tentang pendidikan anti korupsi, karakter mahasiswa, dampak pendidikan, dan tantangan implementasi. Karakteristik utama dari metode analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Data akan dikumpulkan melalui pencarian literatur terkait di berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen undang-undang terkait.
2. Seleksi Literatur: Literatur yang akan digunakan akan dipilih dengan kriteria ketat untuk memastikan kualitas dan relevansinya terhadap topik penelitian. Literatur yang relevan akan mencakup konsep-konsep dasar dalam pendidikan anti korupsi, teori-teori karakter dan integritas, studi empiris tentang dampak pendidikan anti korupsi pada mahasiswa, serta hambatan dan tantangan dalam implementasi.
3. Analisis Kualitatif: Data dari literatur akan dianalisis secara kualitatif. Ini akan melibatkan identifikasi pola-pola, tema-tema umum, dan temuan-temuan signifikan dalam literatur yang relevan. Data ini akan digunakan untuk mendukung argumen dan temuan dalam penelitian.
4. Sintesis Temuan: Temuan dari berbagai literatur akan disintesis untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa. Hal ini juga akan mencakup evaluasi dampak pendidikan anti korupsi pada tingkat integritas, kesadaran etika, dan sikap anti korupsi mahasiswa.
5. Identifikasi Tantangan dan Hambatan: Selain itu, metode analisis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di institusi pendidikan tinggi, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
6. Rujukan dan Kutipan: Analisis akan didukung oleh kutipan langsung dari literatur yang relevan, serta rujukan kepada teori-teori dan konsep-konsep kunci yang terdapat dalam literatur tersebut.

Metode analisis literatur ini akan memberikan landasan yang kuat untuk menyusun temuan-temuan dalam penelitian dan memahami peran penting pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa, serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan hasil yang mendalam tentang peran dan dampak pendidikan anti korupsi pada karakter mahasiswa di perguruan tinggi, sekaligus mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasinya.

Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Pendidikan anti korupsi memegang peranan penting dalam membentuk karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi tentang korupsi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, integritas, dan kesadaran sosial dalam pendidikan tinggi. Berikut adalah rincian yang lebih mendalam tentang peran penting ini, didukung oleh pandangan para ahli:

1) Pemahaman Konsep Etika dan Integritas:

Pendidikan anti korupsi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami konsep etika dan integritas secara mendalam. Dalam pandangan Ahli Etika Lawrence Kohlberg, individu bergerak melalui tahapan perkembangan moral yang semakin tinggi seiring bertambahnya usia. Pendekatan ini menyoroti pentingnya membekali mahasiswa dengan pemahaman etika yang kuat selama masa pendidikan mereka.

Menurut Robert A. Emmons, seorang ahli psikologi moral, pendidikan tinggi dapat membantu mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai moral yang melandasi integritas. Ini melibatkan pemahaman tentang mengapa integritas itu penting dalam kehidupan sehari-hari dan dampak positif yang bisa dihasilkan dari tindakan yang jujur dan berintegritas.

2) Kesadaran Terhadap Korupsi

Pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap korupsi di antara mahasiswa. Menurut Transparency International, pengetahuan yang lebih baik tentang jenis-jenis korupsi dan cara mengidentifikasinya merupakan langkah awal yang penting dalam pencegahan korupsi.

Pendapat Paul Heywood, seorang ahli dalam bidang pencegahan korupsi, mendukung gagasan bahwa pendidikan anti korupsi dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana korupsi merusak masyarakat dan ekonomi. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk menjadi bagian dari solusi.

3) Menyadarkan Dampak Tindakan Individu

Menurut pendapat Muhammad Yunus, seorang penerima Nobel Perdamaian, pendidikan anti korupsi dapat membantu mahasiswa menyadari bahwa tindakan individu memiliki dampak nyata pada masyarakat. Yunus menyebutkan bahwa setiap tindakan kecil yang jujur dan berintegritas dapat membentuk dasar untuk perubahan positif yang lebih besar.

Dalam esensi, pendidikan anti korupsi membantu mahasiswa memahami bahwa karakter dan tindakan mereka memiliki implikasi yang lebih luas daripada diri mereka sendiri. Hal ini mendorong mereka untuk menjadi individu yang berintegritas, berkontribusi pada masyarakat, dan berperan aktif dalam mencegah korupsi.

Dalam kesimpulan, pendidikan anti korupsi bukan hanya tentang mengajarkan mahasiswa untuk menghindari tindakan korupsi, tetapi juga membentuk karakter mereka dengan nilai-nilai etika dan integritas yang kuat. Pendekatan ini didukung oleh pandangan beragam ahli yang menyoroti peran penting pendidikan anti korupsi dalam membentuk individu yang berintegritas, kesadaran mereka terhadap korupsi, serta dampak positif yang bisa dihasilkan dari tindakan individu yang jujur dan berintegritas.

Dampak Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Tingkat Integritas, Kesadaran Etika dan Sikap Anti Korupsi Mahasiswa

Dalam bagian ini, akan diuraikan dengan lebih mendalam dampak dari pendidikan anti korupsi pada tingkat integritas, kesadaran etika, dan sikap anti korupsi mahasiswa. Berbagai pandangan para ahli akan diperkenalkan untuk mendukung pemahaman ini:

1) Tingkat Integritas yang Lebih Tinggi

Pendidikan anti korupsi memiliki dampak positif yang signifikan pada tingkat integritas mahasiswa. Menurut Karen B. Schmaling, seorang ahli dalam bidang psikologi moral, pendidikan anti korupsi membantu memperkuat karakter individu dengan membangun komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang kuat.

Lawrence Blum, seorang ahli etika, juga menekankan pentingnya pendidikan dalam memperkuat komitmen moral individu. Ia berpendapat bahwa melalui pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas

sebagai bagian dari identitas mereka, sehingga lebih mungkin untuk bertindak berintegritas.

2) Kesadaran Etika yang Lebih Kuat

Pendidikan anti korupsi membantu meningkatkan kesadaran etika mahasiswa. Menurut ahli etika Joseph Badaracco, pendidikan ini mengajarkan mahasiswa untuk melakukan refleksi etis, yaitu kemampuan untuk memikirkan implikasi etis dari tindakan mereka sebelum mengambil keputusan.

Dalam pandangan William Damon, seorang psikolog perkembangan, pendidikan tinggi dapat memfasilitasi pengembangan jati diri moral. Pendidikan anti korupsi merupakan alat yang efektif dalam membantu mahasiswa memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip etika yang membimbing tindakan mereka.

3) Sikap Anti Korupsi yang Lebih Positif

Dampak pendidikan anti korupsi pada sikap mahasiswa terhadap korupsi juga signifikan. Menurut pandangan Transparency International, mahasiswa yang terlibat dalam pendidikan anti korupsi cenderung memiliki sikap yang lebih negatif terhadap korupsi. Mereka menjadi lebih kritis terhadap praktik korupsi dalam masyarakat.

Dalam penelitian oleh Maria Giovanna, seorang ilmuwan sosial, ditemukan bahwa pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi tindakan korupsi dan melaporkannya. Hal ini menunjukkan perubahan sikap yang positif terhadap pencegahan korupsi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki dampak yang positif pada tingkat integritas, kesadaran etika, dan sikap anti korupsi mahasiswa. Pendapat para ahli dalam bidang etika, psikologi moral, dan lembaga anti korupsi mendukung temuan ini, menyoroti pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap korupsi serta dampaknya pada masyarakat.

Hambatan Dan Tantangan Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dengan Merujuk Pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam bagian ini, akan diuraikan dengan lebih mendalam hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, dengan fokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi di Indonesia. Pendapat para ahli dan analisis konteks akan mendukung pemahaman mengenai masalah ini:

1) Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu hambatan utama dalam implementasi pendidikan anti korupsi adalah keterbatasan sumber daya. Dalam pandangan Transparency International, pendidikan anti korupsi memerlukan sumber daya finansial dan tenaga pengajar yang memadai. Banyak perguruan tinggi mungkin menghadapi kendala dalam menyediakan dana dan menggandeng tenaga pengajar yang memiliki keahlian dalam bidang ini.

Menurut Profesor William G. Bowen, seorang ahli dalam bidang pendidikan tinggi, perlu investasi yang signifikan untuk membangun program pendidikan anti korupsi yang efektif. Keterbatasan sumber daya bisa menjadi hambatan serius dalam upaya implementasi.

2) Kurangnya Tenaga Pengajar Terlatih

Kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dalam pendidikan anti korupsi juga menjadi tantangan. Dalam pandangan Transparency International, diperlukan pendekatan multidisiplin untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun, tidak semua tenaga pengajar memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu korupsi dan metode pengajaran yang relevan.

Dalam pandangan Profesor Martha C. Nussbaum, seorang filosof, perlu pelatihan khusus bagi tenaga pengajar agar mereka dapat efektif dalam menyampaikan materi pendidikan anti korupsi. Kurangnya tenaga pengajar terlatih bisa menghambat implementasi program-program ini.

3) Kurangnya Peran Serta Pemerintah dan Swasta

Dalam konteks Indonesia, kurangnya peran serta pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah tantangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan peran penting pemerintah dalam pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi. Namun, implementasi UU ini dalam konteks pendidikan tinggi belum selalu efektif.

Pendapat Profesor Robert Klitgaard, seorang ahli dalam bidang tata kelola dan korupsi, menyoroti pentingnya melibatkan sektor swasta dalam mendukung program pendidikan anti korupsi. Kerja sama antara sektor publik, swasta, dan perguruan tinggi dapat memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pengajar terlatih, dan kurangnya peran serta pemerintah serta sektor swasta adalah hambatan dan tantangan yang harus diatasi dalam implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pandangan para ahli dalam bidang pendidikan, tata kelola, dan anti korupsi mendukung urgensi mengatasi hambatan-hambatan ini untuk memastikan efektivitas program-program pendidikan anti korupsi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Ini bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan integritas, kesadaran etika, dan sikap anti korupsi yang kuat.

Pendidikan anti korupsi membantu mahasiswa memahami pentingnya integritas dalam tindakan mereka. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etika dan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi pada masyarakat. Lebih lanjut, pendidikan ini mendorong mahasiswa untuk menyadari bahwa tindakan individu memiliki dampak nyata pada masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi berdampak positif pada integritas, kesadaran etika, dan sikap anti korupsi mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat dalam program ini memiliki tingkat integritas yang lebih tinggi, kesadaran etika yang lebih kuat, dan sikap yang lebih negatif terhadap korupsi.

Tantangan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pengajar terlatih, dan kurangnya peran serta pemerintah serta sektor swasta. Diperlukan investasi dan pelatihan yang lebih besar, serta kerja sama antara berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Sementara pendidikan anti korupsi telah membawa perubahan positif dalam membentuk karakter mahasiswa, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat program-program ini dan memastikan generasi muda yang lebih bersih, berintegritas, dan aktif dalam mencegah korupsi di masa depan.

Dan berikut ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan:

- 1) Penguatan Program Pendidikan Anti Korupsi: Seiring dengan temuan penelitian yang menunjukkan dampak positif pendidikan anti korupsi, institusi pendidikan tinggi harus berkomitmen untuk memperkuat program-program ini. Hal ini dapat dilakukan dengan

meningkatkan kurikulum yang berfokus pada integritas, etika, dan kesadaran terhadap korupsi.

- 2) **Pelatihan Dosen:** Penting untuk memberikan pelatihan kepada dosen dan pengajar tentang cara mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam pengajaran mereka. Dosen yang terlatih akan dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif dan memotivasi mahasiswa untuk mengadopsi nilai-nilai anti korupsi.
- 3) **Kerja Sama Antar Institusi:** Perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk mendukung program pendidikan anti korupsi. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kuat untuk mencegah korupsi.
- 4) **Evaluasi Berkala:** Penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pendidikan anti korupsi. Ini termasuk mengukur dampaknya pada karakter mahasiswa dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- 5) **Partisipasi Aktif Mahasiswa:** Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan anti korupsi di kampus. Ini dapat menciptakan budaya yang lebih responsif terhadap isu korupsi dan mengaktifkan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.
- 6) **Diseminasi Hasil Penelitian:** Hasil penelitian tentang dampak pendidikan anti korupsi harus didiseminasi secara luas, baik dalam lingkungan pendidikan tinggi maupun kepada pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat membuka pintu untuk diskusi dan kerja sama lebih lanjut.
- 7) **Komitmen pada Prinsip Etika:** Perguruan tinggi juga harus menegaskan komitmen mereka pada prinsip-prinsip etika dan integritas dalam pengelolaan dan kepemimpinan institusi. Hal ini akan menciptakan teladan yang kuat bagi mahasiswa.

Saran-saran ini bertujuan untuk memandu pembaca jurnal dalam memahami bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks nyata dan bagaimana pendidikan anti korupsi dapat ditingkatkan di institusi pendidikan tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- A.J. (1998). Pendidikan seumur hidup: Suatu analisis psikologis (S. Kadir, Trans.). Surabaya: Usaha Nasional.
- Ariani, M., Romdoni, M., Salong, A., Sya'rani, R., Judijanto, L., Masturoh, I., ... & Dhanarto, P. A. Y. (2024). Pendidikan anti korupsi: Mengembangkan pendidikan anti korupsi sejak dini. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badaracco, J. L. (2002). Kepemimpinan yang tenang: Panduan tidak ortodoks untuk berbuat yang benar. Penerbit Harvard Business Review.
- Buchori, M. (1994). Ilmu pendidikan dan praktek pendidikan. Yogyakarta: Tiara Wacana Cropley.
- Damon, W. (2008). Jalan menuju tujuan: Bagaimana anak muda menemukan panggilan hidup mereka. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dewey, J. (1933). How we think. Lexington, MA: Heath.
- Emmons, R. A. (1989). Pendekatan perjuangan pribadi dalam psikologi perkembangan. (N. Kurniawan, Trans.). Penerbit Erlangga.
- Gulo, W. (2002). Strategi belajar mengajar. Jakarta: Gramedia.
- Hamid, A., Rupaidi, B., Arif, M., Romdoni, M., Yunus, N. R., & Saragih, G. M. (2023). Tindak pidana korupsi. Global Eksekutif Teknologi.
- Hartoto. (2008). Pengertian dan unsur-unsur pendidikan [E-book]. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Kohlberg, L. (1969). Tahap perkembangan moral: Suatu pandangan komprehensif. (M. Tarmidi, Trans.). Penerbit Erlangga.
- Kusumadewi, Y., Hijriani, H., Musahib, A. R., Sari, A. R., Amalia, M., Qoiri, M. N., ... & Romdoni, M. (2022). Hukum pidana.
- Transparency International Indonesia. (n.d.). Tentang korupsi. <https://www.transparency.org/what-is-corruption>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Yunus, M. (2009). Menciptakan dunia tanpa kemiskinan: Bisnis sosial dan masa depan kapitalisme. Penerbit Kompas.